



# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BKD JABAR

## JANUARI, 2024

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDB e-Perintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841630b9>

BA841630b9

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Laporan ini memuat informasi mengenai metode pelaksanaan survei, responden, serta analisis terhadap 9 unsur pelayanan publik sebagai pembentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan survei ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandung, 1 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.  
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>

BA841820D9

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat engan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat 9 pertanyaan terkait dengan 9 unsur pelayanan. SKM dilaksanakan pada tanggal 2 Januari s.d 31 Januari 2024 dengan total jumlah responden sebanyak **59** orang.

Hasil pengolahan data kuesioner SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun periode bulan Januari menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah adalah Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi sebesar **3,973**

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah **99,329** Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bebas dari pungutan liar, umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan Prima atau *service excellent* merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan kinerja pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pemerintah akan dianggap berhasil jika mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publiknya serta dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM juga merupakan salah satu upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Bidang Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan publik yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pengguna Layanan, sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Kinerja/kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai tolak ukur capaian keberhasilan dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, digunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai angka pembandingnya



## B. Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan kegiatan SKM yaitu untuk mengetahui gambaran kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan transparan sebagai bahan untuk merumuskan alternatif solusi dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan SKM antara lain meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan SKM, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



## D. Instrumen Kegiatan

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan SKM dimaksud adalah kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat, terdiri atas 9 pertanyaan yang memuat 9 variabel/unsur pelayanan sebagai berikut :

### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

### 3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

### 4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

### 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah kegiatan pengelolaan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.



## 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik. Istilah sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin dll) sedangkan istilah prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik sampai dengan tidak baik. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Tidak Baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang Baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3
4. Sangat bBik, diberi nilai persepsi 4

Kuesioner SKM secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**.

## E. Metode Pelaksanaan

### 1. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

SKM dilaksanakan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. SKM dilaksanakan pada periode Bulan Januari 2024.

### 2. Jumlah Responden

Jumlah responden SKM ditentukan berdasarkan jumlah pengguna layanan pada Bulan Januari tahun 2024. Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah diisi, jumlah total responden SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 59 orang.

### 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner SKM online secara mandiri/ sendiri oleh masyarakat penerima layanan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya kuesioner SKM yang telah diisi direkapitulasi oleh Tim Pelaksanaan SKM..

### 4. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data SKM dilakukan oleh Tim Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan program



pengolahan data komputer Microsoft Excel. Berikut ini langkah pengolahan datanya :

- a. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir pada *Microsoft Excel*.
- b. Masing-masing unsur pelayanan pada pertanyaan SKM diberi nilai berdasarkan “nilai rata-rata tertimbang”. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh Nilai SKM Unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM dibuatlah table informasi nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik



3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

## BAB II DATA DAN ANALISIS

### A. Data Kuisisioner

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana pada BAB I, dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Pelayanan yang dilakukan Survei :

- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
  - i. Konsultasi terkait Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
  - ii. Konsultasi terkait Bidang Pengembangan Aparatur
  - iii. Konsultasi terkait Bidang Mutasi dan Promosi
  - iv. Konsultasi terkait Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

#### 2. Nilai Per Unsur Layanan pada setiap Unit Pelayanan

##### a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI UNSUR LAYANAN
1	Persyaratan Layanan	<b>98,870</b>
2	Prosedur Layanan	<b>98,588</b>
3	Waktu Layanan	<b>99,718</b>
4	Biaya/ Tarif	<b>99,435</b>
5	Produk Layanan	<b>99,435</b>
6	Kompetensi Pelaksana	<b>99,435</b>
7	Perilaku Pelaksana	<b>99,718</b>
8	Penanganan Pengaduan	<b>99,435</b>
9	Sarana dan Prasarana	<b>99,435</b>
<b>SKOR IKM</b>		<b>99,329</b>
<b>NILAI INDEKS</b>		<b>3,973</b>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>

## B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut secara umum dilakukan dengan memprioritaskan kepada unsur-unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada unsur yang secara keseluruhan memperoleh nilai baik tetapi masih ada responden yang menyampaikan penilaian yang tidak baik. Tentunya hal tersebut juga akan menjadi pemikiran untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>

BA841820D9

## BAB III

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan data hasil survey maka bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan kepegawaian untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang luar biasa. Capaian nilai survey yang sangat tinggi menjadi salah satu bukti bahwa BKD Provinsi Jawa Barat bekerja dengan sangat baik dalam hal pelayanan kepegawaian.

#### B. Rekomendasi

Sekalipun BKD Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan nilai sangat baik dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, tetap saja ada hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



**DAFTAR KORESPONDEN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BULAN JANUARI TAHUN 2024**

Timestamp	Nama Responden	NIP	ASAL INSTANSI	ASAL OPD	No Handphone
1/2/2024 13:44:44	JS Budi Haryono	196906071998021001	Disdik provinsi Jawa Barat	Cadisdik Wil VIII	082111847669
1/4/2024 8:51:43	DIAN SETIAWATI Z.	196602191996012001	SMP NEGERI 1 TAMANSARI	SMP NEGERI 1 TAMANSARI	081315879740
1/4/2024 9:01:05	rindy putri margeritha	199203252019032014	dinas bina marga dan penataan ruang	pemerintah provinsi jawa barat	085156189006
1/4/2024 9:06:40	Lela Siti Nurlaela	196811252005012005	Dinas Pendidikan	SMAN 8 Bekadi	085691359339
1/4/2024 9:47:46	Irwan khristianto	196105292007011003	bakesbangpol	pemprov jabar	091573486189
1/4/2024 11:19:01	Putut Suwardjo	-	SMAN 23 Kota Bandung	Disdik Prov Jabar	085871270710
1/4/2024 13:49:47	Johny haryanto	197109192014081001	Dinas oendidikan	SMAN 26 bandung	081214182432
1/5/2024 8:44:03	Rima Rahmawati	-	Setda Provinsi Jawa Barat	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Barat	085795550503
1/5/2024 10:30:40	Wiwin lasmini	197204152006042015	Dinas pendidikan	Slb budi mulia cililin	08532993507
1/5/2024 10:32:34	Yeni Ratnaningsih	197203172006042012	Disdik Priv Jabar	Slb Budi Mulia Cililin	
1/5/2024 10:48:14	Mulyati Sari	196607231986102001	Dinas Pendidikan Kab Bandung	Bidang kesetaraan	082115838383
1/5/2024 13:44:03	abdul malik karim	198310172014091002	SMAN I TELUKJAMBE TIMUR	Dimas pendidikan	082298154622
1/5/2024 14:13:28	Cucu Hermawaty	197505242010012002	Dinas Pendidikan	SMAN 2 Cimahi	081287279075
1/5/2024 14:48:18	Agatha riskawati	197908212008012003	Kcd iv	Dinas pendidikan	085779969175
1/5/2024 14:51:00	Eka Merdekawati	198208172010012023	SMKN 1 Karawang	Disdik	081385205700
1/8/2024 8:33:25	Ace	1963120211986031001	Prov jabar	Inspektorat	085321936875
1/8/2024 10:31:22	EUIS KUSNIAR HIDAYAH	196305091987032007	SMAN5 BEKASI	DISDIK	081218906976
1/9/2024 9:01:27	Teti Rohayani	196309061995032001	Sman 1 rancaekek	Disdik	081321364496
1/9/2024 9:42:40	Ramdan kurniawan	198306252010121004	PUPR	-	081222065799
1/9/2024 13:37:33	Euis Rina Nurfitriana	198802142019032013	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	SMKN Jayakarta	085222282622
1/10/2024 10:27:34	Agus setia	196308221989031008	SMKN 5 bandung	Disdik	081289595770
1/10/2024 11:45:04	Rusmini	197105052007012007	SMK 15 KOTA BEKASI	DINAS PENDIDIKAN	08111540571
1/11/2024 8:10:34	Firmansyah	197812012009021003	Sman 9 depok	Dinas pendidikan	085283820686
1/11/2024 10:17:13	Henrizal	196312311988031097	Smkn 5 bdg	Disdik	0813205217435
1/12/2024 10:04:57	Irfan A M	199511162017081001	Pemprov Jabar	Satpol PP Jabar	085243919557
1/12/2024 10:32:15	Tri Listyawati, S.Pd., M. M	197003301993012001	SMA Angkasa Margahayu	Disdik	081916067812
1/12/2024 13:55:55	Ratih Purnasih	198206302009012007	SMKN 3 Baleendah	DINAS PENDIDIKAN	081224601054
1/12/2024 14:40:48	Hasnah heryana	196501251990032007	Slb kab bekasi	Disdik	08111451514
1/15/2024 9:49:31	Djunaedi	196605272007011004	Disnakertrans Prov Jabar	Disnakertrans Prov Jabar	082106401204
1/15/2024 9:51:44	ADE YUHANA	196309271988031006	SMKN 2 SUMEDANG	DISDIKTAPERA	082117902129



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>

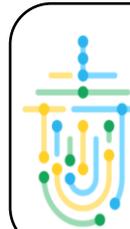
1/15/2024 14:14:51	Mariana Anisa	197612252009012001	Disperindag	Disperidag	085722059193
1/16/2024 14:06:55	Nana Sumarna. SPd	196309031987031006	SMK PU	Disdik	082126090733
1/16/2024 14:30:10	Heri Mulyanto	196509071991031010	Kcd 7 Prov Jabar	Dinas Pendidikan Prov Jabar	08112223034
1/17/2024 10:32:58	Evi Trisnowati	198102042007012010	RSUD LINGGAJATI	Kuningan	082332965957
1/17/2024 11:01:53	Gatot Harmanto	196504301993031005	SMAN 24 BANDUNG	DISDIK PROV JABAR	082115435547
1/17/2024 11:03:01	Cucu Suwartini	196612081993032005	Sman 3 garut	Disdik	089672991949
1/17/2024 11:40:41	Fridah Hanoum Nasution	197105312007012005	SMA NEGERI 6 BEKASI	Dinas pendidikan	089508794490
1/17/2024 13:47:40	Lilis Siti komariah	196905232007012003	Sibn cicendo	Disdik provinsi	087825522452
1/18/2024 8:43:29	lis nuryani	196311291989032008	SMAN 3 cimahi	Disdik	08973976906
1/18/2024 10:19:22	Matin MN	0	SMAN 1 CIMAH	Dinas Pendidikan	082127315873
1/19/2024 13:54:59	Wawan sayuti	197912112011011001	SMKN 1 Palasah	Disdik	0813242135903
1/22/2024 9:13:56	Sakti	081323589519	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	Bappeda Provinsi Jawa Barat	081323589519
1/22/2024 14:16:51	Suheri	196906022007011007	Pemprov Jabar	Dishut Jabar	081222037204
1/23/2024 9:26:51	Egi Ahmad Juwaeni	198811012023211004	SMKN 12 BANDUNG	Jawabarat	089601014632
1/23/2024 9:33:54	EGI AHMAD JUWAENI	198811012023211004	SMKN 12 BANDUNG	SMKN 12 BANDUNG	089601014632
1/23/2024 10:06:40	Irma Sulistiany	197405232008012003	KCD VII	Disdik	08128059278
1/23/2024 10:41:26	ASEP NURDIANSYAH	199409172023211009	SMAN 1 KANDANGHAUR	Indramayu	089660658544
1/23/2024 10:54:39	Farhatin Nihayati	198604142023212023	SMA Negeri 1 Lelea	Indramayu	081931131031
1/23/2024 10:56:38	CHANDRA IRIANI	196401011987032014	SMAN 10 BANDUNG	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	083821559432
1/25/2024 9:00:27	Aip. Saripudin	196412091993031003	SMKN 1 Bandung.	DISDIK JABAR	081222139439
1/25/2024 9:12:22	Eddy Susanto	197105152008011010	KCD 7	Disdik Prov Jabar	08157062200
1/25/2024 9:59:27	Epi Syamsuarip	196704042023211001	kcd 7	disdik prov jabar	083102226806
1/25/2024 10:05:55	Herman	196403172008011005	Disdik jabar	SMKN 5 Bandung	087822003443
1/25/2024 13:59:55	Widya Dwi Jayanti	199806122020122008	Pemprov Jabar	Disperindag	089660581690
1/26/2024 9:31:04	MUHSINUN	199401312022211006	SMKN 15 BANDUNG	DISDIK JABAR	085703458200
1/29/2024 14:43:52	Maya Kusmayanti, M.Pd	198105072010012015	SMKN 13 Bandung	Dinas Pendidikan	081322040983
1/29/2024 15:01:25	Asep Sirundani	197609132023211003	SMAN 15 KOTA DEPOK	DISDIK	081809471889
1/31/2024 9:52:16	Reza	199111042014021002	Disdik	Disdik	
1/31/2024 9:54:50	Lukman Nur Hakim	198308272010121002	Pemprov Jawa Barat	Dinas Pendidikan	085718192783



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>

Mengetahui  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Barat**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.  
Pembina Utama Madya



BA841820D9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA841820D9>